

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Sunan, W. B. (2014). *Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)*. Jakarta: Ref Graphika.
- Amstutz, M. R. (1998). *Internasional Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics*. Boston: McGraw Hill.
- Damanik, R. (2008). *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*. Jakarta: WALHI.
- Kusumastanto, T. (2003). *Ocean Policy dalam membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manurung, d. (2011). *Forest Wacht Indonesia*. Jakarta: WALHI Press.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Surakarta: Surakarta : Farida Nugrahani, 2014 M.
- Riza Damanik, d. (2008). *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*. Jakarta: WALHI.
- Wardana, W. A. (1985). *Dampak Pencemaran Lingkungan* . Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal

- Apriliani, F. Y. (2015). Dampak Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing Terhadap Kondisi Perikanan Tuna: Studi Kasus di DKI Jakarta. *E-journal-balitbang KKP*, 2.
- Atika Zahra Rahmayanti, B. D. (2017). IMPLIKASI KEBIJAKAN MORATORIUM PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP TERHADAP SEKTOR PERIKANAN DI BITUNG. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 25, No. 1, 3*.
- Ayu, H. (2019). ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING (IUUF) DI INDONESIA. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Universitas Semarang*.
- Basuki, A. Q. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Journal UIN*, 179.

- Benny Osta Nababan, A. S. (2018). DAMPAK SOSIAL EKONOMI KEBIJAKAN LARANGAN PUKAT HELA DAN PUKAT TARIK DI PANTAI UTARA JAWA. *Jurnal Indonesia Marine Fellows Program - MFP*, 12.
- Chairun Nasirin, D. H. (2017). Kontroversi Implementasi Kebijakan Peneggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *Jurnal Universitas Negeri Sebelas Maret*.
- Duadji, T. N. (2017). Dampak Ekonomi Politik Kebijakan Peneggelaman Kapal di Indonesia. *Jurnal Administrasi Fisip Unila*, 12.
- Fachruddin, S. (2013). Metode Kuantitatif untuk analisis kebijakan. *ResearchGate*.
- Fernando Yehuda Ariyanto, Y. A. (2019). PENERAPAN TEORI WATER BOUNDARIES UNTUK PENENTUAN IZIN LOKASI PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA. *Seminar Nasional Geomatika*.
- Hermawan, C. N. (2017). Kontroversi Implementasi Kebijakan Peneggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *Jurnal Universitas Negeri Sebelas Maret*.
- Hertria Maharani Putri, R. P. (2017). KEBIJAKAN PENEGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM. *Jurnal Kebijakan Sosek KP Vol. 7 No. 2*, 98-100.
- Hidayat, D. M. (2018). ANALISIS KERUGIAN EKONOMI AKIBAT ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSklusif PERAIRAN NATUNA. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018*, 268.
- Hidayat, F. R. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN ALAT TANGKAP CANTRANG DI KABUPATEN REMBANG . *Journal Of Public Policy And Management Review Vol. 6 No. 2, 3*.
- Jaelani, A. Q. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*.
- Kadek Intan Rahayu, D. G. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum Vol. 2*, 149.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2017). Laut Masa Depan Bangsa: Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan. *Buku Putih KKP*, 22.

- KSI Indonesia. (2015). Modul Pelatihan Analisis Kebijakan. *Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*, 17.
- Kurniawan, W. H. (2020). Kajian Kebijakan Peneggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Dengan Discourse Network Analysis. *Jurnal Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG's*.
- Laoli, N. (2015, Januari 16). *Terancam bangkrut gara-gara larangan transshipment*. Retrieved from Industri Kontan: <https://industri.kontan.co.id/news/terancambangkrut-gara-gara-larangan-transshipment>
- Maksum, A. (2015). Poros Maritim dan Politik Luar Negeri Jokowi. *Andalas Journal of International Studies Vol 4 No 1*, 11.
- Muhamad, S. V. (2016). Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya secara Bilateral di Kawasan. *DPR RI*.
- Munawar, M. H. (2018). Analisis Kebijakan Peneggelaman Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia Tahun 2014-2017. *Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 4, 2018, hal 879-888*, 884.
- Muthiah, N. (2016). Pukat Dogol. *Scribd*, 1.
- Rahmah. (2009). Penyelesaian Hukum dalam Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (Studi kasus No. 584/Pid.B/2007/PN.Mdn). *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Salsabila, A. P. (2018). Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia. *Jurnal Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 1, Universitas Negeri Semarang*, 7-8.
- Saputra, E. R. (2017). ILLICIT ENRICHMENT DALAM PENEGAKKAN HUKUM PENGAMBILAN IKAN SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL FISHING) DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, 50.
- Saputra, F. A. (2016). Dampak Program Pemberantasan IUU Fishing terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-China. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional Univeritas Mulawarman*, 1273.
- Setiawati, E. (2015). Analisis Terhadap Pilihan Kebijakan Pemerintah Untuk

Menenggelamkan Kapal Ikan Nelayan Asing di Lihat Dari Sisi Kemanfaatan Kepada Nelayan Tradisional Indonesia dan Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Nestor Magister Hukum 3, no. 3: 210020.*

- Setiyo, H. d. (2017). Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 1, 75.*
- Sri Basriati, R. A. (2018). Penyelesaian Model Transshipment dengan Metode Least Cost, North West Corner dan Vogel's Approximation Method (Studi Kasus: PT. Subur Bangun Transport). *E-Journal UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 726.*
- Sulastri, A. S. (2017). Pengantar Studi Politik Luar Negeri. *Jurnal UMJ Press, 7.*
- Wahyuddin, M. N. (2017). PENGARUH PRAKTIK ILLEGAL FISHING TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI NELAYAN DI PROVINSI ACEH. *Seminar Nasional II USM 2017 Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh di Era Globalisasi dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, 414.*
- Wismawayana, M. A. (2020). Orientasi Baru Kebijakan di Laut oleh Pemerintah Indonesia: Pergeseran dari Deterensi ke Strategi Ekonomi. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional RI.*
- Youdy R. Suawa, d. (2019). Efektivitas tindakan hukum penenggelaman kapal dalam pemberantasan illegal fishing di wilayah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara. *Journal of Aquatic Science & Management, Vol. 7, No. 1, 15-16.*
- Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia terhadap Kapal Asing yang melakukan Illegal Fishing Mengacu pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1.*

Laporan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2017). *Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016.* Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2018). *Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Internet

Ambari, M. (2015, May 19). *Hasil Moratorium Kapal Eks-Asing, Perikanan Indonesia Mulai Menggeliat*. Retrieved from Mongabay:

<https://www.mongabay.co.id/2015/05/19/hasil-moratorium-kapal-eks-asingperikanan-indonesia-mulai-menggeliat/>

Ambari, M. (2019, Mei 14). *Peneggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia*. Retrieved from Mongabay:

<https://www.mongabay.co.id/2019/05/14/peneggelaman-kapal-pencuri-ikanjalan-keluar-terbaik-bagi-indonesia/>

Ambarita, M. (2018, September 3). *Kenaikan Nilai Tukar Nelayan Sejahterakan Nelayan Indonesia?* Retrieved from Mongabay:

<https://www.mongabay.co.id/2018/09/03/kenaikan-nilai-tukar-nelayansejahterakan-nelayan-indonesia/>

Ariyanti, F. (2015, Mei 20). *Aturan Keluar, Menteri Susi Ledakan 40 Kapal*. Retrieved from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2235866/aturan-keluar-menterisusi-ledakan-40-kapal>

Aryo, M. A. (2020, Oktober 4). *Perluakah melanjutkan kebijakan peneggelaman kapal?* Retrieved from Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan:

<http://www.pskp.or.id/2020/10/04/perluakah-melanjutkan-kebijakanpeneggelaman-kapal/>

Asyhad, A. (2016, Juli 12). *SOFIA, Kebutuhan Ikan di Dunia, dan Pentingnya Data yang Akurat*. Retrieved from Detik Finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/d-3251345/sofia-kebutuhan-ikan-di-dunia-dan-pentingnya-data-yang-akurat>

Biro Kerja Sama dan Humas. (2018, January 31). *Nelayan Dukung Kebijakan Peneggelaman Kapal*. Retrieved from News.kkp: <https://news.kkp.go.id/index.php/nelayandukung-kebijakan-peneggelaman-kapal/>

Dewi, H. d. (2019, April 24). *RI POROS MARITIM DUNIA : Visi Besar Tanpa Rencana Detail*. Retrieved Desember 14, 2019, from www.ekonomibisnis.com

- Elnizar, N. E. (2017, Oktober 26). *Begini Penjelasan Hukum atas Penenggelaman Kapal terlibat Illegal Fishing*. Retrieved from HukumOnline.com:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f149581edd7/begini-penjelasanhukum-atas-penenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing/>
- Hartriani, J. (2016, Februari 22). *Indonesia, Surga Perikanan Dunia*. Retrieved from Katadata.co.id:
<https://katadata.co.id/arsip/infografik/5e9a56dc320dc/indonesiasurga-perikanan-dunia#sthash.5nf2FqfG.dpbs>
- Hartriani, J. (2017, Februari 17). *Potensi Besar Laut Indonesia*. Retrieved from Katadata.co.id:
<https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik/5e9a56adcf179/potensi-besarlaut-indonesia>
- Hudayana, A. (2017, Desember). Efektivitas Pemberlakuan Kebijakan Larangan Transshipment (Alih Muatan) Tangkapan Perikanan Terhadap Kinerja Usaha Penangkapan Ikan Kapal Long Line. *Skripsi*, 26-27. Retrieved from Skripsi Universitas Brawijaya:
<http://repository.ub.ac.id/314/1.haslightboxThumbnailVersion/Amelia%20Hudayana.pdf>
- Ika. (2018, Oktober 23). *Indonesia Miliki Potensi Besar Sektor Perikanan*. Retrieved from Universitas Gadjah Mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/17264-indonesia.miliki.potensi.besar.sektor.perikanan#:~:text=%E2%80%9CPotensi%20perikanan%20Indonesia%20cukup%20besar,4%20juta%20ton%20hasil%20tangkapan.>
- Jannah, S. M. (2019, April 8). *Pemerintah Targetkan Indonesia miliki 1,1 juta Nelayan Berdaulat*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/pemerintah-targetkan-indonesiamiliki-1-juta-nelayan-berdaulat-dlwg>
- Jayani, D. H. (2019, Juli 15). *Riset GFW: Larangan Kapal Asing Efektif Tekan Penangkapan Ikan Illegal*. Retrieved from Katadata.co.id:
<https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a50d7675c4/riset-gfw-larangan-kapalasing-efektif-tekan-penangkapan-ikan-ilegal>
- Kiara. (2013, Juni 11). *Pencurian Ikan Meningkat Drastis*. Retrieved from KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan):
<http://www.kiara.or.id/2013/06/11/pencurianikan-meningkat-drastis/>
- KOMINFO. (2016, Oktober 18). *Menuju Poros Maritim Dunia*. Retrieved from Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritimdunia/0/kerja_nyata

- Kunjana, G. (2015, November 1). *Susi Cabut Moratorium Izin Kapal Ikan Eks Asing*. Retrieved from Investor Daily: <https://investor.id/archive/susi-cabut-moratorium-izin-kapal-ikan-eks-asing>
- NOAA FISHERIES. (2020, Februari 4). *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*. Retrieved from NOAA FISHERIES: <https://www.fisheries.noaa.gov/international-affairs/illegal-unreported-and-unregulated-fishing>
- Prasongko, D. (2019, Juli 6). *TEMPO.CO*. Retrieved from Sejak 2014, Susi Pudjiastuti Telah Tenggelamkan 516 Kapal: <https://bisnis.tempo.co/read/1221792/sejak-2014-susipudjiastuti-telah-tenggelamkan-516-kapal/full&view=ok>
- Pregiwati, L. A. (2018, Agustus 21). *Hari Kemerdekaan, Pemerintah Tenggelamkan 125 Kapal Pelaku Illegal Fishing*. Retrieved from KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA: <https://kkp.go.id/artikel/5714-hari-kemerdekaan-pemerintah-tenggelamkan-125-kapal-pelaku-illegal-fishing>
- Rahardjo, M. (2010, Oktober 15). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. Retrieved from GEMA: Media Informasi dan Kebijakan Kampus Universitas Islam Negeri: <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Rajagukguk, R. (2018, Januari 12). *Nelayan NTT Dukung Kebijakan Menteri Susi*. Retrieved from iNews.id: <https://www.inews.id/finance/makro/nelayan-ntt-dukung-kebijakan-menteri-susi>
- Ramadhani, S. (2014, Januari 7). *2013, 39 Kapal Asing Ilegal Curi Ikan RI*. Retrieved from Oke Finance: <https://economy.okezone.com/read/2014/01/07/320/923024/2013-39kapal-asing-ilegal-curi-ikan-ri>
- Reily, M. (2019, Januari 31). *Jokowi Sebut Larangan Kapal Asing Berhasil Usir 7 Ribu Kapal Ilegal*. Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a555100044/jokowi-sebut-larangankapal-asing-berhasil-usir-7-ribu-kapal-ilegal>
- Rohingati, S. (2014, Desember 5). *Info Singkat Hukum Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014. Peneggelaman kapal ikan asing : Upaya penegakkan Hukum Laut Indonesia, 2*. Retrieved from Peneggelaman kapal asing: upaya penegakkan hukum laut Indonesia: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-28.pdf
- Rusli, R. B. (2020, Oktober 16). *Pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) Untuk Perkuat Pengawasan Illegal Fishing Di Indonesia*. Retrieved from TaniLogic.com: <https://tanilogic.com/2020/10/pemasangan-vessel-monitoring-system/>

Sabriana, I. (2020, Juli 16). *Larangan Transshipment, Perekonomian Ikan Lesu*. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/isa-sabriana-1594876562886647298/larangan-transshipment-perekonomian-ikan-lesu-1tocvIBFeqj/ful>

SUCOFINDO. (2011, Maret 15). *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Retrieved from SUCOFINDO : <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegalunreported-and-unregulated-iuu-fishing>

Tim Riset dan Publikasi. (2017, November 9). *Moratorium Kapal Eks-Asing, Tangkapan Ikan Nelayan Lokal Meningkat*. Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/infografik/5e9a5626301b6/moratorium-kapal-eks-asing-tangkapan-ikan-nelayan-lokal-meningkat>

Widyanita. (2016, Oktober 20). *Tangkapan Ikan Kapal Asing Turun, Kapal Lokal Naik*. Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/herisusanto/infografik/5e9a56bda354d/kapal-asing-buntungkapal-lokal-beruntung>

Wismabrata, M. H. (2019, May 13). *5 Fakta Menteri Susi Lawan Pencurian Ikan, 539 Kapal Ditenggelamkan hingga Alasan "Illegal Fishing" Sulit Diberantas*. Retrieved from Kompas: <https://regional.kompas.com/read/2019/05/13/09412571/5-faktamenteri-susi-lawan-pencurian-ikan-539-kapal-ditenggelamkan-hingga?page=3>

Yudhistira, A. W. (2019, Mei 9). *Sejak 2014, Menteri Susi Sudah Tenggelamkan 503 Kapal Pencuri Ikan*. Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a51929f6ad/sejak-2014menteri-susi-sudah-tenggelamkan-503-kapal-pencuri-ikan>

Yusep. (2015, February). *TRANSHIPMENT: PENGERTIAN, KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN*. Retrieved from Oceano Fish: <https://oceanofish.com/transshipment-pengertiankeuntungan-dan-kerugian/>

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004
United Nations Conventio on the Law of the Sea (UNCLOS)

United Nations Convention agaist Corruption (UNCAC)